



► PROGRAM PENDIDIKAN

Sekolah Rakyat Akan Dibangun Seyegan

SLEMAN—Dinas Sosial (Dinsos) Sleman menyiapkan lahan di Kapanewon Seyegan sebagai calon lokasi sekolah rakyat (SR) berasrama di Bumi Sembada.

Sekretaris Dinsos Sleman, Sigit Indarto, mengatakan jajarannya telah menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan perangkat daerah lain pada Senin (24/3). Rakor tersebut merupakan tindak lanjut surat dari kementerian Sosial mengenai partisipasi daerah dalam pembentukan SR.

Ada dua pilihan lokasi yang disediakan, yaitu di Margoluwih dengan lahan seluas lima hektare, dan di Margodadi seluas empat hektare. Kedua lahan yang berada di Kapanewon Seyegan tersebut berstatus tanah kas desa (TKD). Ada satu lagi yang disediakan

Pemkab, yaitu di Kalurahan Sendangtirto, Berbah.

Dinsos akan berkonsultasi dengan Bupati Sleman, Harda Kiswaya, dalam menentukan lokasi pembangunan SR. Menurut Sigit, lahan yang tersedia hanya lahan berstatus TKD. Adapun tanah milik Pemkab Sleman paling luas hanya 900 meter persegi di Kapanewon Turi. Padahal pembangunan sekolah rakyat perlu sekitar tiga hektare, termasuk asrama di dalamnya.

"Kami hanya diminta usul lokasi, luas lahan, status lahan, jenjang pendidikan, dan kapasitas. Itu yang kami laporkan ke Pusat. Nanti Pusat akan meninjau, baru kemudian ada pembangunan. Tapi kami belum mendapat gambaran dan operasional sekolah itu akan

bagaimana," kata Sigit ditemui di kantornya, Selasa (8/4).

Dinsos memilih jenjang SMP untuk SR. Per tingkat ada dua rombongan belajar (rombel). Dengan begitu, ada total enam rombel dengan per rombel 25 orang. Per angkatan bisa mencapai 50 pelajar.

Menurut Sigit, pembangunan SR tidak akan dilakukan secara besar-besaran dalam satu waktu. Paling tidak, gedung sekolah dapat digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar dengan fasilitas pelengkap.

"Sekolah rakyat ini gambarannya bagaimana anak-anak keluarga miskin bisa mendapat pendidikan karakter sejak SD, SMP, SMA. Kalau karakter seorang anak baik, anak akan mau berkuliah, sehingga nantinya bisa memutus

mata rantai kemiskinan," katanya.

Pendidikan karakter yang diberikan melalui asrama akan lebih mudah lantaran pengawasan dapat dilakukan secara ketat. Program ini juga sejalan dengan misi Bupati Sleman, yaitu satu keluarga miskin satu sarjana. Dinsos hanya perlu meneruskan program tersebut dengan bantuan pembiayaan di jenjang perguruan tinggi.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Dinsos Sleman, Feri Istanto, mengatakan jenjang SMP lebih tepat untuk SR di Sleman. Adapun jenjang SD kurang tepat karena jarak rumah pelajar dengan SD di Sleman cenderung dekat.

"Pembangunan nanti dilakukan Pusat, kemungkinan baru tahun depan. Pakai APBN juga kan.

Kami tinggal menyiapkan lahan dan menerima," kata Feri.

Meski pembangunan direncanakan tahun depan, Feri mengaku Kemensos meminta Dinsos Sleman untuk melakukan sosialisasi dan merekrut calon pelajar yang akan mengisi sekolah rakyat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Purwomartani dan Balai Besar Penelitian Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kasihan, Bantul.

Paling tidak, *kick off* sekolah rakyat di dua lokasi tersebut dilakukan pada Juli 2025 untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA). Sebab itu, Dinsos diminta mencari calon siswa yang saat ini duduk di bangku kelas III SMP. (Andreas Yuda Pramono)



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
